

## BAB V

### KESIMPULAN

Isu-isu ekonomi dan keamanan menjadi dominasi isu yang berkembang pada sistem internasional. Investasi kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan metode Investasi dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Perusahaan-perusahaan multinasional besar dan konglomerat-konglomerat masih menjadi bagian terbesar dari FDI (sumber: UNCTAD). Negara-negara ASEAN dengan penghasilan menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina kini tengah menghadapi tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik mereka sebagai tuan rumah bagi investasi dalam lingkungan ekonomi yang berubah dengan pesat.

Dinamika investasi yang masuk ke dalam negeri juga menjadi indikasi akan adanya geliat ekonomi, dinamika dan potensi pasar. Investasi yang dinamis juga merupakan signal dari efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha di dalam sistem ekonomi. Namun, pentingnya masuknya investasi asing ke Indonesia menjadi dan menimbulkan permasalahan besar pada saat terjadi penurunan tingkat investasi semenjak krisis ekonomi Asia. Sebagai negara investor utama di Indonesia, Jepang turut memperlihatkan angka penurunan investasi terhadap Indonesia.

Penelitian ini diadakan untuk meneliti kondisi-kondisi apakah yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi investasi Jepang ke Indonesia pada tahun 2001-2006. Masalah ini dilihat berdasarkan pemikiran Robert Pitchard yang mengetengahkan tentang faktor penentu mengalirnya penanaman modal asing, yaitu *comparative advantage* dan *competitive advantage*. Dalam hal ini, *comparative advantage* berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, *country risk* serta *opportunity cost* dilihat dari sisi Indonesia sebagai negara tujuan berinvestasi, dan *competitive advantage* yang dipergunakan untuk menganalisa sisi Jepang sebagai negara investor.

Pada penelitian ini ditemukan beberapa hal. Yang pertama yaitu telah terjadi perubahan dalam *comparative advantage* Indonesia sebagai akibat dari adanya berbagai permasalahan dalam negeri setelah terjadinya krisis ekonomi Asia 1997, yang tidak saja berimplikasi pada sektor ekonomi semata, namun juga pada sektor politik serta sosial Indonesia. Sektor-sektor ini masih pula memberi pengaruh pada tahun 2001-2006, tepatnya pada masa kepemimpinan presiden Megawati (2001-2004) dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang).

Kondisi tersebut secara garis besar memberi pengaruh dan dampak negatif terhadap iklim lingkungan investasi di Indonesia, yang menyebabkan timbulnya peningkatan biaya ekonomis dan ekonomis serta peningkatan beban pada aktivitas investor di Indonesia, khususnya Jepang.

Beban ekonomi Jepang yang semenjak awal cukup besar semakin meningkat dengan terjadinya penurunan *comparative advantage* di Indonesia, yang mengakibatkan proses produksi MNC Jepang di Indonesia mengalami hambatan.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari penelitian ini, apabila melihat *comparative advantage* Indonesia, terlihat bahwa sesungguhnya faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia memiliki kerentanan dari segi daya saingnya terhadap negara lain yang memiliki faktor sumber daya yang sama. Sementara kelemahan dari faktor sumber daya manusia Indonesia adalah kecenderungannya untuk mengandalkan sektor-sektor perekonomian padat karya dengan tuntutan tingkat keterampilan dan pendidikan rendah. Kondisi ini apabila dihubungkan dengan adanya permasalahan *country risk* dan *opportunity cost* memperlihatkan bahwa tingkat ketertarikan investor, khususnya Jepang akan menurun seiring dengan waktu. Hal ini dikarenakan munculnya daerah-daerah tujuan investasi baru dengan faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah dengan biaya rendah serta tingkat *country risk* dan *opportunity cost* yang relatif lebih baik daripada Indonesia.

Persaingan di kawasan Asia, khususnya dalam hal penawaran sumber daya alam dan manusia sebagai faktor penarik masuknya investasi asing memang cukup ketat. Sebelum terjadinya krisis ekonomi Asia di tahun 1997,

posisi Indonesia relatif memiliki daya tarik besar terhadap investor, namun kondisi itu berubah saat terjadi krisis ekonomi Asia 1997 dimana Indonesia sendiri tidak mampu mempertahankan daya tarik *comparative advantage* yang dimilikinya akibat dari instabilitas kondisi nasionalnya. Kondisi ini diperburuk dengan adanya peningkatan *comparative advantage* negara-negara lain yang sama dengan Indonesia sama-sama mengalami devaluasi mata uang sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam hal produksi akibat penurunan biaya produksi (apabila dibandingkan dengan kurs US\$), seperti Thailand.

Faktor-faktor pada *comparative advantage* khususnya unsur *political risk*, jelas tidak bisa diabaikan. Studi yang penulis lakukan atas pengaruh risiko politik menunjukkan bahwa variabel politik merupakan variabel yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, khususnya pengaruhnya terhadap investasi luar negeri dan kurs mata uang. Bahkan, risiko politik jauh lebih besar pengaruhnya dibanding risiko finansial maupun risiko ekonomi. Komponen risiko politik biasanya menempati bobot yang paling besar dalam membentuk *country risk* tersebut. Karena itu, apabila destabilitas politik meningkat, maka *country risk* pun akan meningkat secara signifikan.

Dari segi *competitive advantage* Jepang, perbaikan domestik Jepang akan memberikan dampak positif bagi performa Jepang di Indonesia. Hal ini dikarenakan Jepang akan memiliki sumber modal baru yang mampu mengatasi permasalahan kondisi perekonomian Indonesia yang dihadapi MNC Jepang.

Hal yang tak kalah penting dalam penelitian ini adalah besarnya peranan pemerintah Indonesia dan Jepang dalam mempengaruhi kondisi perekonomian nasional diantara satu dengan yang lain. Pemerintah sangat memberi perhatian pada investasi karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat yang signifikan. Kebijakan pemerintah Indonesia serta peranan pemerintah Jepang dalam mempengaruhi aktivitas MNC diakui tidak selalu dapat dianalisa oleh perspektif liberalis semata seperti yang dipergunakan dalam penelitian ini. Fenomena keberadaan Jepang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dalam satu sudut pandang, sehingga dalam penelitian ini terlihat bahwa perspektif liberalis tidak mampu menjelaskan secara lengkap kondisi-kondisi yang terjadi.

Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, kini belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) Jepang-Indonesia yang diantaranya berisi kesepakatan menurunkan tarif bea masuk ekspor, diyakini juga akan memberikan solusi terhadap permasalahan hambatan nontarif perdagangan kedua negara.

Sementara itu, tiga pilar penting yang diusung menjadi platform IJ-EPA-yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan peningkatan kapasitas-mungkin tidak akan pernah berdampak maksimal bila tidak dibarengi oleh berbagai kebijakan pendukung, selain kesiapan birokrat dan pelaku usaha di negeri ini. Jepang hanya meminta Indonesia memperbaiki iklim usaha dan mendorong kepercayaan bisnis melalui kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modalnya di Tanah Air.

ASEAN sebagai salah-satu sarana bagi perwujudan kepentingan ketahanan ekonomi nasional mempunyai peluang-peluang yang terbuka untuk dimanfaatkan berkaitan dengan perluasan jaringan ekonomi yang terorganisasikan melalui program-program AFTA dan AIA.

Jepang adalah mitra dagang dan sumber investasi terbesar kedua bagi ASEAN setelah Amerika Serikat. Karena hubungan ASEAN-Jepang mengalami beberapa kemajuan, peran ASEAN dan Jepang haruslah mendukung pembentukan komunitas regional di kawasan dengan menempatkan kembali isu-isu dasar, seperti membangun saling percaya dan kebiasaan melakukan dialog di kawasan Asia Timur.

Dalam hal kebijakan investasi yang dikeluarkan dari masing-masing presiden terkait, yaitu Megawati dan SBY, tidak memberi pengaruh yang berarti pada usaha dalam meningkatkan masuknya investasi asing. Hal ini dikarenakan dapat kita lihat pada paket yang dibuat pemerintahan Megawati sendiri, sasaran utamanya adalah untuk mencapai posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*), penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan mitra-mitra dagang Indonesia, serta terpeliharanya cadangan devisa

yang cukup dalam jangka menengah. Dalam kebijakan ini pula, yang disinggung dalam hal investasi adalah dalam hal investasi ekspor, sehingga tidaklah mengherankan bahwa pada masa pemerintahannya tidak terjadi peningkatan berarti.

Sedangkan pada masa pemerintahan presiden SBY, paket kebijakan yang ada juga tidak cukup menyangkut masalah peningkatan investasi. Presiden memang telah menetapkan pembentukan suatu tim nasional dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, tetapi kebijakan ini dianggap gagal karena tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan.

Kebijakan-kebijakan tersebut, menurut penulis belum cukup mampu untuk mendorong hadirnya investasi di Indonesia. Sehingga yang sangat diperlukan dalam rangka mendorong hadirnya investasi asing di Indonesia adalah adanya kebijakan pendukung yang dikeluarkan oleh departemen terkait. Mitra investasi yaitu Jepang, sudah memainkan peranan penting dalam modernisasi ekonomi Indonesia. Karena alasan historis dan pengalaman ini, maka tidak ada alasan bahwa Indonesia ditinggalkan dalam gerakan modal dan investasi global. Masalahnya sekarang ada pada diri sendiri yang dapat memperkuat kelembagaan untuk melakukan promosi investasi dan memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.

Tampak jelas, kebijakan ekonomi negeri ini dikendalikan oleh asing/penjajah. Padahal BUMN, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber pemasukan sangat besar bagi negara untuk menjalankan pembangunan, memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Namun, karena privatisasi, negara kehilangan sumber pemasukan. Beban pembiayaan negara pun dibebankan kepada rakyat. Misalnya melalui pajak dan pungutan lain yang beragam dan bertambah besar. Beban yang harus ditanggung oleh rakyat pun kian hari kian berat.

Pelayanan pada investasi asing, keberadaan prasarana, dan kepastian hukum yang buruk jadi alasan utama di balik buruknya penampilan Indonesia tersebut. Ada beberapa hal yang diharapkan dari Indonesia, yakni perbaikan peraturan dan prasarana, sehingga Indonesia bisa kembali meraih pamornya yang pernah dimiliki satu dekade lalu. Yang diinginkan adalah agar ke depan nanti

investasi baik di dalam maupun di luar negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan mendorong ekspor lebih tinggi lagi.

Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang mengalami fluktuasi sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, kini belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Pemerintah sadar bahwa perdagangan dan investasi tidak bisa dipisahkan. Meskipun tren investasi juga membaik, tetapi belum cukup untuk mendongkrak ekonomi Indonesia dengan lebih cepat lagi.

Potensi tingkat investasi Jepang di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang dapat diindikasikan meningkat, selama perbaikan kondisi ekonomi Indonesia dan Jepang dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk sementara ini, bagi Indonesia yang memang memerlukan sumber dana, upaya perbaikan kondisi perekonomian nasional menjadi suatu hal yang mendesak dan di sisi lain alternatif pencarian sumber alternatif modal baru dapat dijadikan pilihan yang mungkin dapat memberikan dampak positif bagi kebutuhan jangka pendek perekonomian nasionalnya.

Kesepakatan JI-EPA akan menjadi perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan oleh Indonesia, dan merupakan perjanjian yang paling komprehensif. Alasannya, negara Matahari Terbit tersebut adalah pasar ekspor terbesar bagi produk RI, investor terbesar, dan donor bilateral terbesar. Bentuk hubungan perdagangan bebas yang asimetris seperti ini dapat memungkinkan akan merugikan pihak Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama tersebut hendaknya dapat dievaluasi kembali. Ditambah lagi, mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengedepankan kepentingan nasional, menyelamatkan sumber daya alam, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (upah dan keahlian), serta keuntungan ekonomi Indonesia.

Pemerintah harus hati-hati dalam melakukan perundingan bilateral seperti EPA dengan negara-negara maju. Sebab, EPA dinilai hanya menjadi alat baru bagi negara maju untuk menekan negara berkembang, setelah mereka gagal 'memaksakan' kehendaknya dalam setiap perundingan yang digelar WTO. Namun, walau Jepang dianggap negara cukup santun dalam melakukan negosiasi

bilateral, kendati begitu, penulis mengingatkan pemerintah Indonesia harus tetap berhati-hati. Sebab, EPA yang digagas Jepang mengusung kepentingan khusus untuk melakukan ekspansi produk manufaktur mereka. Sehingga tetaplah harus dicurigai motifnya.

Liberalisasi perdagangan merupakan realita yang tak bisa dipungkiri oleh Indonesia, sehingga jalan tengahnya adalah menjalin kerjasama dengan negara maju yang dinilai bisa memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Yang paling diharapkan dari Jepang adalah investasi. Dan negosiasi itu nantinya akan mengambil prinsip-prinsip, dan harus konsisten dengan RUU Penanaman Modal. Kerjasama yang sudah dilakukan Indonesia-Jepang tidak hanya diharapkan meningkatkan perdagangan kedua negara, namun yang terlebih lagi memulihkan kepercayaan Jepang berinvestasi di Indonesia.

